



JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 15, Nomor 1, Maret 2021 : i-xxx

Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018

p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)

Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Penasihat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah** : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi (Editor)** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)** : 1. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
2. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Trisapto Wahyudi Agung N, S.S., M.Si.
5. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
6. Haryono, S.Sos., M.H.
7. Imam Lukito, S.T., M.H.
- Redaksi Pelaksana** : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris** : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Ibnu Prasetyo, S.H.
- Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copyeditor)** : 1. Amirah Balqis S.H.
2. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos.
3. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P
4. Mira Sukmawati, S.I.P.
5. Novzel Ridho Abednego Hasugian S.I.P.
- Teknologi Sistem Informasi** : 1. Machyudhie, S.T.
2. Mochamad Arip, S.Kom.
3. Harysandy Permana, S.Kom.
4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com
ejournalkebijakan@gmail.com

HALAMAN KOSONG

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bebestari yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Prof. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2. Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

3. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. M. Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politeknik Ilmu Pemasaran

HALAMAN KOSONG

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (ARTICLES)

Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan Sebagai Solusi Alternatif Mengatasi <i>Overcrowded</i> (<i>Establishment Of New Work Units Of Correctional Alternative Solutions To Overcome Overcrowded</i>)	1 - 16
Ahmad Jazuli	

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan (<i>Implications of Amendments of Correctional Law on the Treatments of Child and Prisoners</i>)	17 - 36
Haryono	

Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum (<i>Effective Patterns for Legal Guidance to Improve the Success of Legal Development</i>)	37 - 48
Muhammad Agung Ardiputra	

Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan (<i>Analyzes on the Making of Nusakambangan Management Organization as a Pilot Project for the Revitalization of Correctional Institution</i>)	49 - 66
Imam Lukito, Edward James Sinaga	

TINJAUAN HUKUM (REVIEW)

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (<i>Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector</i>)	67 - 80
Khwarizmi Maulana Simatupang	

Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film (<i>Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players</i>)	81 - 94
Antonio Rajoli Ginting	

Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah” pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) (<i>Copyright Infringement by Government Agencies (Case Study of "How Far I'll Go" Film Broadcasting 'Learn From Home' Program by the Ministry of Education and Culture)</i>)	95 - 110
Dewi Analis Indriyani	

Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia (<i>Fair Use Principles in Song Cover Based on Indonesian Copyright Law</i>)	111 - 132
Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran	

Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia (<i>The Importance Wisdom Principle Based on Pancasila in Indonesian Law and Democracy</i>)	133 - 148
Made Oka Cahyadi Wiguna	

Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara (<i>The Omnibus Law Conceptualization In The Nation's Capital Relocation</i>)	149 - 164
Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi	

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. Eksistensi dan keberkataan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada Volume 15 Nomor 1, Maret 2021 ini, redaksi memuat artikel sebanyak 10 tulisan. Dalam edisi ini dimuat hasil-hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia, mulai dari Peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, kekayaan intelektual. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang diterima dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang tidak hanya ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM namun juga dari Institusi/Akademisi dari pelbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

HALAMAN KOSONG

Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

**p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2579-7425 (online)**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I**

HALAMAN KOSONG

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Ahmad Jazuli (The Ministry of Law and Human Rights)

**Establishment Of New Work Units Of Correctional Alternative Solutions
To Overcome Overcrowded**

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

The trend of increasing population in correctional/state detention centers (overcrowded) in the last five years (2016-2020) has significantly impacted prisoners and inmates' service and development. With a qualitative approach, this study aims to answer the formulation of problems related to the correctional/state detention centers' existing condition, the solutions for handling them, and the obstacles. The discussion indicated that 67 new work units are needed to take into account the overcrowded rate priority scale in each region. Implementation solutions include: to transfer/redistribute prisoners; make overcrowded mapping of correctional/state detention centers; build new correctional/state detention centers in buffer areas as a satellite on overcrowded correctional/state detention centers, implement the revitalization of correctional facilities; and optimize the construction of minimum security correctional. Meanwhile, the constraints faced to solve overcrowded issues are related to regulations, budget, human resources in correctional/state detention centers, facilities, and local governments' support.

Keywords: overcrowded; solution; work unit; correctional.

Haryono (The Ministry of Law and Human Rights)

**Implications of Amendments of Correctional Law on the Treatments
of Child and Prisoners**

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

Amendment to Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections as a legal basis for implementing the correctional system is in the discussion stage. The Draft Law on Corrections emphasizes the correctional function in the criminal justice system and the correctional function as lawbreakers' treatment. After being passed into law, fundamental changes in the penitentiary bill will have implications for the treatment of prisoners, children, and convict in prison. The formulation of the problem raised is the projection of the implications of the amendment to the correctional law on prisoners, children, and prisoners? The research aims to see the projected implications of changing the correctional law on the treatment of prisoners, children, and prisoners when it is passed. This research is descriptive normative legal research. The results showed that the regulation of rights and obligations and the correctional function's implementation in the Draft Law on Corrections has expanded. The expansion of these regulations has implications for increasing the fulfillment of the rights of detainees, children and prisoners, changes in guidance patterns and technical changes in the implementation of the correctional system.

Keywords: implication; draft law; treatment; correctional.

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Muhammad Agung Ardiputra (The Ministry of Law and Human Rights)

Effective Patterns for Legal Guidance to Improve the Success of Legal Development

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

Ineffectiveness of legal guidance is an essential problem in legal development, so that special attention from legal officials in developing innovation is needed. In UU No. 17 Tahun 2007, Law development intended to create a society that has a awareness and high legal culture. Thus, the pattern of legal guidance must be oriented towards creating awareness and legal culture of society to support the development of national legal system. In obtaining data and information, this research uses literature and field studies. Changes in the criminal rate in people's lives and changes percentage of prisoners provide an illustration of level effectiveness of legal guidance that's been running. Indonesia as a constitutional state that faces various challenges in exercising the rule of law makes the legal apparatur need to formulate new steps to support and strengthen the implementation of the legal development program. One of them is through legal guidance to create a legal culture. For the empirical aspect, so far legal guidance only focused on implementation without quality and effectiveness. Thus, the government and all elements of society need to support a legal development program that fosters law innovation and new steps in realizing legal guidance that has quality and high-effectiveness on social, nationality and statehood.

Keywords : legal guidance; legal development; legal awareness.

Imam Lukito, Edward James Sinaga (The Ministry of Law and Human Rights)

Analyzes on the Making of Nusakambangan Management Organization as a Pilot Project for the Revitalization of Correctional Institution

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

In 1908 Nusakambangan was designated as a home for prisoners, then 1912 as a "prison island" by the Dutch Government. Its appointment as a pilot project for the acceleration implementation of Correctional Revitalization was carried out to maximize the prisoner's development. Nusakambangan has a large area that can be used for the correctional. Until now, with eight Correctional, land use has not been optimal, both in planning, utilization, management and supervision. There is also no organization to coordinate the correctional and land management. This paper discusses the current use of Nusakambangan and its management organization model to support correctional. This research is a descriptive analysis with a qualitative approach. The analysis shows that Nusakambangan is an integrated area for correctional revitalization based on productive land use. An organizational model will be formed to coordinate the Correctional units and carry out the tasks and functions of land use and management in Nusakambangan. For this reason, clear regulations are needed in the management of Nusakambangan, certifying the assets in Nusakambangan, and optimizing the redistribution of prisoners. Furthermore, it is necessary to form a work unit with a model to coordinate the correctional units and land management of Nusakambangan.

Keywords: organizational model, nusakambangan, correctional revitalization.

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Khwarizmi Maulana Simatupang (Indonesia University, Depok)

Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

The development of science and technology has made life changes. Technology in the internet world had a significant impact, and the internet has introduced people to the digital world. This development also affects the law, especially the law related to copyright. Creations now can be converted into digital form or create digital creations. The copyright law that previously protected traditional forms of copyright must evolve to include protecting digital copyrighted works by collaborating with technology. The problem raised about how is legal protection for works in the digital era and how the implications of the effect of security technology on the legal protection of digital copyright works. This research is normative research with a qualitative descriptive approach. That technological provides benefits such as easy distribution/announcement, but on the other hand, violations are also easier to occur. In response to this development, WIPO issued two international conventions known as WIPO Internet Treaties, which several countries adopted. Indonesian state in its positive copyright law has implemented digital copyright protection in its articles. The author's suggestions in this study need to be further enriched by our copyright law regarding digital copyright protection.

Keywords: protection, Copyright, digital.

Antonio Rajoli Ginting (The Ministry of Law and Human Rights)

Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

The process of creating a movie is a collaborative process not only between director and producer but also including actors who perform. Actors are bound by an agreement with the director and producer, as the creator and the copyright holder. However, only a few cases regulate the royalty distribution for movie performers. This paper would like to examine how Indonesian laws have to regulate the royalty distribution for movie performers. This paper aims to analyze and formulate the ideal model of royalty distribution for movie performers. Research methods that will be used are normative legal research with a qualitative approach and descriptive research. In the analysis chapter, based on Indonesia legal jurisdiction, movie performers may obtain royalty only if there was an agreement with the copyright holder. The royalty distribution model that can be applied is based on the profit percentage generated by any platform's income, excluding theatre. In the end, this research concludes that movie performers as related rights holder may adopt the percentage royalty distribution model only if there was an agreement before. This research then suggests that every party should contribute to the well-being of Indonesia's film industries.

Keywords: film; royalties; film players.

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Dewi Analis Indriyani (The Ministry of Law and Human Rights)

Copyright Infringement by Government Agencies (Case Study of "How Far I'll Go" Film Broadcasting 'Learn From Home' Program by the Ministry of Education and Culture)

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

The broadcast of "How Far I'll Go" documentary on TVRI as part of the 'Learn from Home' Program by the Ministry of Education and Culture received a legal notice from the film director regarding the broadcast, modification, and mutilation without prior consent and permission from neither the creators nor copyright holders of the film. The problems in this research: the forms of copyright infringement committed by the Ministry of Education and Culture, and legal steps to be taken in case of copyright infringement by government agencies. This research is juridical-normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach by examining laws and regulations relevant to legal issues. The research concludes that broadcasting "How Far I'll Go" film without prior consent, permission, or license from the film's copyright holders. The broadcast also violates moral and economic rights leading to the detriment of their honour. Preventive steps are to understand all regulations on the copyright or obtain a written license registered in DGIP. The legal steps are filing complaints, either civil or criminal, to DGIP and or Police to reach a mediation process or dispute resolution by Arbitration or filing a claim for compensation to the Commercial Court.

Keywords: *copyright infringement; government; license; agreement.*

Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran (Satya Wacana Christian University)

Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

Along with technological developments, cover a song has become popular on social media. Cover songs are activities to show other versions of songs by parties other than creators or Copyright holders. The question arises as to whether the cover action of this song is a Copyright infringement. On the other side, it is important to understand that the fair use concept is related to songs covering. Furthermore, this article wants to answer whether the fair use principle applicable to the act of song covering. This article argues that cover a song in social media does not violate copyrights; as long as; it meets the principles of fair use. This fair use principle is in Article 43 letter d of Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights, which is non-commercial, beneficial to the creator. The creator does not object to the activity of song covering on social media. This article is legal research that uses a legislative approach, a theoretical approach, and a comparative approach. Consistent with the retained thesis, this article concludes: First, cover a song is considered copyright infringement. Second, the principle of fair use is a limitation in copyright ownership. Third, Article 43 letter d of Law No. 28 of 2014 is applicable for cover a song. Therefore, cover a song on social media can be justified based on the principle of fair use.

Keywords: *copyrights; fair use; infringement; song cover.*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Made Oka Cahyadi Wiguna (National Education University, Denpasar)

The Importance Wisdom Principle Based on Pancasila in Indonesian Law and Democracy

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

Various problems in the democratic process have an impact on various aspects of the life of the nation and state. Guidelines are needed to return the direction of democracy to the direction it should be, Returning to a democratic model based on Pancasila. The state has an obligation and authority to carry out a democratic process based on law and basic democratic principles. It is important to restore a democratic life based on laws based on the values of Pancasila. The research question is, what is the meaning of the Fourth Principles of Pancasila in democracy life in Indonesia? and how the strategy to ground the Fourth Principle of Pancasila in the law and democracy in Indonesia?. This research is doctrinal research using formal legal sources and secondary legal sources. The results of this study indicate that the Fourth Principle of Pancasila contains basic principles in democratic life. Furthermore, these principles cannot separate from each other from the other principles. In a democratic process, necessary the wisdom principles for all stakeholders. This wisdom principle seems to be a principle that has a very fundamental philosophical meaning in the life of law and democracy in Indonesia.

Keywords: wisdom principle; law; democracy; Pancasila.

Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi (The Constitutional Court of the Republic of Indonesia)

The Omnibus Law Conceptualization In The Nation's Capital Relocation

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 1, March 2021

The omnibus law is a matter of community debatable because it is considered a tool to cut Indonesian regulations instantly. With 8451 central regulations and 15965 regional regulations, it has not boosted Indonesia's position to become a developed country. In contrast, many regulations make it the government difficult to accelerate policy decisions. The harmonization and simplification of regulations still not solved this problem. Therefore, omnibus law is the most appropriate way to solve this problem. This research focuses on answering (a) the historical legal of regulation arrangement in Indonesia; (b) efforts to improve the quality of the Indonesian regulations; (c) the omnibus law conceptualization of state capital relocation. The research purpose is to find, understand, and analyze the historical legal of regulations arrangement, efforts the improving quality of the Indonesian regulations and formulate the omnibus law conceptualization of state capital relocation. This research is normative legal research, with the statute, concepts, and historical approach. This research indicates that the government must harmonize dozens of laws and regional regulations into the law on state capital relocation. The use of the omnibus law in state capital relocation is the best option to simplify regulations to support state capital relocation policy.

Keywords: omnibus law; regulation; state capitals relocation; simplification of regulations

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Ahmad Jazuli (Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan Sebagai Solusi Alternatif Mengatasi Overcrowded

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Tren meningkatnya populasi penghuni Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara (overcrowded) dalam lima tahun terakhir (2016-2020) berdampak sangat signifikan pada pelayanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait kondisi lapas/rutan saat ini, solusi penanganan, dan kendala-kendala yang terjadi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa diperlukan pembentukan satuan kerja baru sebanyak 67 buah dengan memperhatikan skala prioritas overcrowded rate di masing-masing wilayah. Solusi implementatif yang dilakukan antara lain: memindahkan (redistribusi) narapidana; melakukan pemetaan overcrowded lapas/rutan; membangun lapas/rutan baru di wilayah-wilayah penyangga sebagai satelit lapas/rutan yang overcrowded, mengimplementasikan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan; dan optimalisasi pembangunan lapas minimum security. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan overkapasitas yaitu yang terkait regulasi, anggaran, SDM di lapas/rutan, sarana dan prasarana, dan dukungan pemerintah daerah.

Kata kunci: *overcrowded*; *solusi*; *satuan kerja*; *pemasyarakatan*.

Haryono (Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Ketidakefektifan pembinaan hukum menjadi suatu permasalahan esensial dalam pembangunan hukum, sehingga perhatian khusus dari para aparatur hukum dalam mengembangkan inovasi hukum menjadi sangat diperlukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2007, Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi. Sehingga, pola pembinaan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesadaran dan budaya hukum untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu hukum di masyarakat dan mendukung pengembangan sistem hukum nasional. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Perubahan angka kriminal dalam kehidupan masyarakat serta perubahan persentase jumlah tahanan/narapidana memberikan gambaran tingkat keefektifitasan pembinaan hukum yang selama ini telah dijalankan. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan supremasi hukum membuat para aparatur hukum perlu menyusun langkah-langkah baru yang semakin mendukung dan menguatkan pelaksanaan program pembangunan hukum. Salah satunya melalui pembinaan hukum untuk melahirkan budaya hukum. Melihat pada aspek empirisnya, selama ini pembinaan hukum hanya berfokus pada kegiatan pelaksanaannya tanpa memperhatikan kualitas dan efektivitas outputnya. Sehingga, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung program pembinaan hukum yang menumbuhkembangkan inovasi hukum dan langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan hukum yang berkualitas tinggi dan punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Kata kunci: *implikasi*; *rancangan undang-undang*; *perlakuan*; *pemasyarakatan*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Muhammad Agung Ardiputra (Rutan Kelas II B Pasangkayu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)

Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Ketidakefektifan pembinaan hukum menjadi suatu permasalahan esensial dalam pembangunan hukum, sehingga perhatian khusus dari para aparatur hukum dalam mengembangkan inovasi hukum menjadi sangat diperlukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2007, Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi. Sehingga, pola pembinaan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesadaran dan budaya hukum untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu hukum di masyarakat dan mendukung pengembangan sistem hukum nasional. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Perubahan angka kriminal dalam kehidupan masyarakat serta perubahan persentase jumlah tahanan/narapidana memberikan gambaran tingkat keefektifitasan pembinaan hukum yang selama ini telah dijalankan. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan supremasi hukum membuat para aparatur hukum perlu menyusun langkah-langkah baru yang semakin mendukung dan menguatkan pelaksanaan program pembangunan hukum. Salah satunya melalui pembinaan hukum untuk melahirkan budaya hukum. Melihat pada aspek empirisnya, selama ini pembinaan hukum hanya berfokus pada kegiatan pelaksanaannya tanpa memperhatikan kualitas dan efektivitas outputnya. Sehingga, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung program pembinaan hukum yang menumbuhkembangkan inovasi hukum dan langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan hukum yang berkualitas tinggi dan punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Kata kunci: *pembinaan hukum; pembangunan hukum; kesadaran hukum.*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Imam Lukito, Edward James Sinaga (Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasarakatan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Pada tahun 1908 Nusakambangan telah ditetapkan sebagai rumah bagi mereka yang menjalani masa hukuman dan selanjutnya pada tahun 1912 ditetapkan sebagai “pulau penjara” oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penetapan Nusakambangan sebagai *pilot project* percepatan pelaksanaan Revitalisasi Pemasarakatan dilakukan dalam upaya memaksimalkan pembinaan narapidana. Nusakambangan memiliki lahan sangat luas yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tugas dan fungsi pemasarakatan. Di lahan sangat luas tersebut terdapat delapan unit kerja Pemasarakatan. Hingga saat ini pemanfaatan lahan belum optimal, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, maupun pengawasan. Selain itu, juga belum memiliki organisasi pengkoordinasi unit kerja pemasarakatan dan pengolahan lahan. Tulisan ini membahas pemanfaatan Nusakambangan saat ini, serta model organisasi pengelolaan Nusakambangan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pemasarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis diperoleh bahwa Nusakambangan saat ini dimanfaatkan sebagai kawasan terpadu revitalisasi pembinaan narapidana berbasis pada pemanfaatan lahan produktif. Model organisasi yang akan dibentuk sebagai pengkoordinasi unit kerja Pemasarakatan di Nusakambangan serta dapat melakukan tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas dalam pengelolaan Nusakambangan, mensertifikasi aset Barang Milik Negara di Nusakambangan, dan mengoptimalkan redistribusi narapidana. Serta perlu membentuk unit kerja dengan model sebagai pengkoordinasi unit kerja pemasarakatan dan pengelolaan lahan Nusakambangan.

Kata kunci: model organisasi; nusakambangan; revitalisasi pemasarakatan.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Khwarizmi Maulana Simatupang (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi perubahan dalam kehidupan. Teknologi yang memberi dampak cukup besar adalah teknologi dunia internet, adanya internet mengenalkan masyarakat kepada dunia digital. Tentu saja perkembangan ini juga mempengaruhi hukum, terutama hukum terkait hak cipta. Karya cipta yang dahulu masih berbentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk digital atau membuat karya cipta digital. Dalam hal ini hukum hak cipta yang sebelumnya melindungi karya cipta bentuk tradisi haruslah berkembang dapat mencakup melindungi karya cipta digital salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan teknologi. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan dalam era digital dan bagaimana implikasi pengaruh teknologi pengaman terhadap perlindungan hukum karya cipta digital. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Bahwa perkembangan teknologi membuat karya cipta dapat diubah menjadi bentuk digital, hal ini memberikan keuntungan seperti mudahnya penyebaran/pengumuman karya cipta namun disisi lain pelanggaran juga semakin mudah terjadi. Menghadapi perkembangan ini WIPO mengeluarkan dua konvensi internasional yang dikenal sebagai WIPO Internet Treaties yang diadopsi oleh beberapa negara. Negara Indonesia dalam hukum positif hak ciptanya telah mengimplementasikan perlindungan karya cipta digital dalam pasal-pasalannya. Saran penulis dalam kajian ini perlu lebih diperkaya hukum hak cipta kita perihal perlindungan karya cipta digital.

Kata Kunci: perlindungan; hak cipta; digital.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Antonio Rajoli Ginting (Universitas Indonesia)

Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Film sebagai suatu karya sinematografi terdapat unsur hak cipta dan hak terkait didalamnya. Film terbentuk dari kerjasama antara insan perfilman untuk mewujudkan suatu ide cerita. Sutradara dan produser membutuhkan pemain film untuk memerankan karakter dan adegan dalam film. Pemain film sebagai pelaku pertunjukan mengikat diri dengan perjanjian kepada sutradara dan produser sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Namun masih jarang terjadi pemberian royalti bagi pemain film dalam perjanjian. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan royalti kepada pemain film menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan model pemberian royalti yang dapat diterapkan terhadap pemain film. Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaturan pemberian royalti dan merumuskan pemodelan pemberian royalti bagi pemain film. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil pembahasan diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan, pemain film dapat memperoleh royalti namun harus dengan perjanjian kepada pencipta yakni sutradara maupun produser. Model pemberian royalti yang dapat diterapkan yakni dengan prosentasi dari keuntungan film tersebut diputar di platform selain bioskop. Kesimpulan penelitian yakni Pemain film sebagai hak terkait yakni pelaku pertunjukan dapat memperoleh royalti dengan model prosentase apabila adanya perjanjian terlebih dahulu. Saran dalam penelitian adalah setiap insan perfilman dapat menciptakan ekosistem perfilman yang memberikan kesejahteraan atas hasil karyanya.

Kata kunci: film; royalti; pemain film.

Dewi Analis Indriyani (Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah” Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Film dokumenter “Sejauh Kumelangkah” yang ditayangkan pada Program Belajar dari Rumah Kemendikbud RI di TVRI mendapatkan somasi dari Sutradara Film tersebut atas penayangan, modifikasi dan mutilasi tanpa sepengetahuan dan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta film. Rumusan masalah penulisan ini yaitu apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Kemendikbud, dan bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh lembaga pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penayangan film Sejauh Kumelangkah tanpa sepengetahuan, izin maupun lisensi dari pemegang hak cipta film tersebut, selain itu juga melanggar hak moral dan hak ekonomi hingga merugikan kehormatan dirinya. Langkah preventif adalah dengan memahami semua aturan yang berkaitan dengan hak cipta, atau sekurang-kurangnya mendapatkan izin lisensi secara tertulis yang telah didaftarkan di DJKI. Langkah-langkah hukum bila terjadi pelanggaran hak cipta, dengan membuat aduan baik perdata maupun pidana kepada DJKI dan/atau Kepolisian agar difasilitasi mediasi, atau melalui penyelesaian sengketa secara Arbitrase atau dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.

Kata kunci: pelanggaran hak cipta; pemerintah; lisensi; perjanjian.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga)

Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindakan *cover* lagu banyak dilakukan oleh pengguna sosial media. Pada dasarnya *cover* lagu merupakan kegiatan mempertunjukkan versi lain dari lagu oleh pihak selain pencipta atau pemegang Hak Cipta. Terhadap hal ini muncul pertanyaan, apakah tindakan *cover* lagu ini merupakan pelanggaran Hak Cipta. Disisi lain terdapat konsep fair use dalam Hak Cipta yang perlu diungkapkan khususnya terkait *cover* lagu. Lebih lanjut juga dipertanyakan apakah prinsip *fair use* tersebut dapat diaplikasikan pada tindakan *cover* lagu. Penelitian ini hendak mempertahankan argumen bahwa *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta sepanjang memenuhi prinsip *fair use* yang terdapat dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas kegiatan *cover* lagu di media sosial. Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritik, dan pendekatan perbandingan. Konsisten dengan thesis yang dipertahankan, artikel ini menyimpulkan bahwa *cover* lagu berpotensi melanggar Hak Cipta; prinsip *fair use* merupakan pembatasan dalam kepemilikan Hak Cipta; Pasal 43 huruf d dapat diaplikasikan untuk tindakan *cover* lagu, sehingga tindakan *cover* lagu di media sosial dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *fair use*.

Kata kunci: hak cipta; fair use; pelanggaran; cover lagu.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Made Oka Cahyadi Wiguna (Universitas Pendidikan Nasional Denpasar)

Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Berbagai masalah dalam proses berdemokrasi tentunya dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan penuntun yang dapat mengembalikan arah demokrasi ke arah yang seharusnya. Mengembalikannya kepada model demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa. Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Penting untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa makna Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? dan bagaimana strategi membumikan prinsip kebijaksanaan berdasarkan Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi berlandaskan hukum di Indonesia? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian doktrinal yang menggunakan sumber hukum formil atau bahan hukum primer dan sumber hukum materiil atau bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sila Keempat Pancasila, mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terpisah satu sama lain dengan prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam Sila-Sila lainnya. Dalam proses berdemokrasi perlu untuk dimunculkan dan dikedepankan prinsip kebijaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Prinsip kebijaksanaan ini nampaknya menjadi prinsip yang mempunyai makna filosofi yang sangat fundamental dalam hukum yang menjadi landasan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kata kunci: prinsip kebijaksanaan; hukum; demokrasi; Pancasila.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021

Omnibus law menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan. Bahkan ditahun 2020, dengan 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah belum mampu mendongkrak posisi Indonesia menjadi negara maju. Sebaliknya, banyaknya regulasi membuat pemerintah sulit melakukan akselerasi pengambilan kebijakan karena rumitnya regulasi dari pusat hingga daerah. Harmonisasi dan simplifikasi regulasi yang dilakukan masih belum mampu mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, penyederhaan regulasi melalui *omnibus law* dipandang sebagai cara paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini berfokus untuk menjawab (a) *legal historis* penataan regulasi di Indonesia; (b) upaya meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia; (c) konseptualisasi *omnibus law* pemindahan ibukota negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa *legal historis* penataan regulasi di Indonesia, upaya meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia, dan merumuskan konseptualisasi *omnibus law* pemindahan ibukota negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemindahan ibukota negara harus ada harmonisasi puluhan undang-undang hingga peraturan daerah ke dalam undang-undang ibukota negara. Penggunaan *omnibus law* dalam pemindahan ibukota negara merupakan pilihan yang relevan dalam menyederhanakan regulasi untuk menunjang kebijakan pemindahan ibukota negara.

Kata kunci: *omnibus law*; regulasi; pemindahan ibukota negara; simplifikasi regulasi.

HALAMAN KOSONG